



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Rabu 16 AGUSTUS 2023

RINGKASAN BERITA HARI INI



Dari kiri, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wakil Ketua DPRD Emir Perdana, Kaspar, Bambang Riyoko, dan Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes menandatangani persetujuan pinjaman RSUD Sidoarjo pada Sabtu (12/8/2023) malam. (Foto: Fatma Rizkiyanti/etik.co.id)

DPRD-Bupati Restui RSUD Sidoarjo Utang Bank Rp 60 M

ETIK, SIDOARJO – RSUD Sidoarjo berupaya terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Untuk itu, RSUD Sidoarjo telah membangun Gedung Pusat Terpadu (GPT) dengan biaya APBD Rp 70 miliar. RSUD juga bakal mendirikan fasilitas gedung baru dengan investasi bank Rp 60 miliar.

Peretujuan pagaran jumlah miliar ke bank tersebut ditandatangani Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dengan pemimpin DPRD dalam undangan pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Sabtu malam (12/8/2023) lalu.

Dengan kerjanjari tersebut, para pimpinan DPRD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo menandatangani rencana utang jumlah miliar tersebut. Perandatangani berlangsung di depan para petinggi Pemkab Sidoarjo, anggota DPRD, maupun undangan lain yang hadir.

Pada Selasa siang (15/8/2023), pimpinan dewan ketidangan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo dan manajemen Bank Jatim di kantor DPRD Sidoarjo. Terlihat beberapa perwakilan Bank Jatim dan Dirut RSUD Sidoarjo di Acak Isman. Pertemuan berlangsung hingga sekitar pukul 14.00.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Dr Emir Perdana menjelaskan, posisi DPRD Sidoarjo dalam hal ini hanya memberikan persetujuan dalam perijinan tersebut. Karena status RSUD Sidoarjo merupakan badan layanan umum daerah (BLUD), pengoperasian itu akan dibayar oleh RSUD sendiri. Jadi, APBD Sidoarjo tidak akan terbebani.

Skandal Kecurangan Pajak Terungkap, Legislatif Tegaskan Perlu Pasang CCTV

KOTA Kecurangan dalam pembayaran pajak terungkap. Hal ini setelah Pemadinas Pajak Abdi Mada Budia, Pajonono Pajak Daerah (PPD) Sidoarjo Succeeded Nemboro beruma yang melakukan langkah tegas terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan kecurangan.

Di antaranya, modal kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Kecurangan tersebut terjadi dalam bentuk manipulasi pembayaran pajak. Di mana wajib pajak tidak hanya membayar sekitar 30 hingga 30 persen dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Contohnya, jika jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sekitar Rp 1 juta, wajib pajak hanya membayar sekitar Rp 300 ribu atau Rp 700 ribu. Maka itu diketahui oleh PPD Sidoarjo melalui analisis data pembayaran yang dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

"Harus analisis menggunakan data-data tersebut karena data yang terungkap oleh data yang terungkap dua transaksi dalam sehari," katanya.

Alasannya tersebut, DPRD Sidoarjo menitikberatkan untuk memasang tindakan lebih lanjut dengan turun langsung ke lapangan. Mereka mengupayakan lain untuk memastikan sebagai pembaruan, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kecurangan tersebut tidak terulang.

Harusnya, jika jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sekitar Rp 1 juta, wajib pajak hanya membayar sekitar Rp 300 ribu atau Rp 700 ribu. Maka itu diketahui oleh PPD Sidoarjo melalui analisis data pembayaran yang dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

"Harus analisis menggunakan data-data tersebut karena data yang terungkap oleh data yang terungkap dua transaksi dalam sehari," katanya.

Alasannya tersebut, DPRD Sidoarjo menitikberatkan untuk memasang tindakan lebih lanjut dengan turun langsung ke lapangan. Mereka mengupayakan lain untuk memastikan sebagai pembaruan, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan kecurangan tersebut tidak terulang.

Harusnya, jika jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sekitar Rp 1 juta, wajib pajak hanya membayar sekitar Rp 300 ribu atau Rp 700 ribu. Maka itu diketahui oleh PPD Sidoarjo melalui analisis data pembayaran yang dibandingkan dengan kondisi di lapangan.



Bangun Rumah Sehat yang Terintegrasi dengan RSUD Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai program kesehatan salah satunya, RSUD Sidoarjo, beberapa program layanan kesehatan, mulai rencana investasi rumah sakit, pemukiman rumah sakit yang dikelola daerah, hingga membangun rumah sakit kesehatan.

BUPATI Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, secara umum RSUD Sidoarjo berkeinginan besar menciptakan ekosistem yang mendukung di bidang kesehatan, baik peningkatan sarana prasarana dengan kualitas pelayanan. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemkab Sidoarjo.

Pertama, tahun depan RSUD Sidoarjo menjadi satu-satunya Kabupaten yang memiliki rumah sakit tipe A. Kedua, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe B. Ketiga, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe C. Keempat, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe D. Kelima, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe E. Keenam, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe F. Ketujuh, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe G. Kedelapan, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe H. Kesembilan, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe I. Kesepuluh, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe J.

KADO **REPUBLIK**

di sekitarnya. "Kami pastikan ekosistemnya sudah diatur. Saya juga percaya, tapi pasti," ujarnya.

Kemudian, menurut Muhdlor, sangat penting swagenggalan 12 ribu kader kesehatan di Sidoarjo. Tahun ini harus selesai bagi mereka sudah diberikan. Mereka juga diprediksi lewat BPJS Kesehatan. "Yang terpenting, progress-nya progress serentak. Jadi serentak, bukan harus dipertahankan lebih baik lagi," katanya.

Perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kredibilitas RSUD, kata Muhdlor, harus Sibid Rini mulai dibenahi. Di antara RSUD Sidoarjo di Anak Iwanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan (GPT) akan menjadi pilokan agar 35 persen naik kelas menjadi tipe A. "Gedungnya baru juga belum selesai. Itu akan jadi tantangan. Kita akan memastikan, hingga kekecukupan adalah kebutuhan rumah sakit di sekitarnya."

Menurut Muhdlor, RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe B. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe C. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe D. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe E. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe F. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe G. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe H. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe I. RSUD Sidoarjo akan memiliki rumah sakit tipe J.

Siapkan Rp 90 M untuk Pilkada 2024

KOTA Selain pemilihan presiden dan legislatif, tahun depan Kota Delta juga akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M Iskak menjelaskan, persiapan anggaran untuk pelaksanaan pilkada mulai dilakukan.

Saat ini pemkab dan dewan sedang membahas KUA-PPAS APBD 2024. Dana untuk pilkada bakal dibagikan juga.

Iskak menjelaskan, dalam pertemuan antara KPU dan pemkab, telah disepakati bahwa anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar Rp 90 miliar. "Untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pilkada serentak," katanya.

Menurut Iskak, tahapan pilkada perencanaan akan dimulai sejak awal tahun. Namun pihaknya masih harus menunggu aturan lebih lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dia menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp 90 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung operasional badan ad-hoc penyelenggara.

Sepeci Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (KPPS) selama berlangsungnya berbagai tahapan Pilkada.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Politik & Pemerintahan / DPRD-Bupati Restui RSUD Sidoarjo Utang Bank Rp 60 M



Dari kiri, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wakil Ketua DPRD Emir Firdaus, Kayan, Bambang Riyoko, dan Ketua DPRD Sidoarjo H Usman MKes menandatangani persetujuan pinjaman RSUD Sidoarjo pada Sabtu (12/8/2023) malam. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

DPRD-Bupati Restui RSUD Sidoarjo Utang Bank Rp 60 M

Politik & Pemerintahan



Jurnalis: Fathur Roziq | Editor: M. Rifat

Rabu, 16 Agustus 2023 07:51

KETIK, SIDOARJO – RSUD Sidoarjo berupaya terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Tidak hanya membangun Gedung Pusat Terpadu (GPT) dengan biaya APBD Rp 70 miliar RSUD juga bakal mendirikan fasilitas gedung baru dengan berutang ke bank Rp 60 miliar.

Persetujuan pinjaman puluhan miliar ke bank tersebut ditandatangani Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dengan pimpinan DPRD dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Sabtu malam (19/8/2023) lalu.

Dengan senyum merekah, para pimpinan DPRD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo menandatangani rencana utang puluhan miliar tersebut. Penandatanganan berlangsung di depan para petinggi Pemkab Sidoarjo, anggota DPRD, maupun undangan lain yang hadir.

Pada Selasa siang (15/8/2023), pimpinan dewan kedatangan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo dan manajemen Bank Jatim di kantor DPRD Sidoarjo. Terlihat beberapa perwakilan Bank Jatim dan Dirut RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan. Pertemuan berlangsung hingga sekitar pukul 14.00.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Dr Emir Firdaus menjelaskan, posisi DPRD Sidoarjo dalam hal ini hanya memberikan persetujuan dalam peminjaman tersebut. Karena status RSUD Sidoarjo merupakan badan layanan usaha daerah (BLUD), pinjaman itu akan dibayar oleh RSUD sendiri. Jadi, APBD Sidoarjo tidak akan terbebani.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Ahmad Muhdlor (empat dari kiri) bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo saat ground breaking pembangunan Gedung Pusat Terpadu (GPT) RSUD Sidoarjo pada awal Juli lalu. (Foto: Diskominfo Sidoarjo)

Persetujuan pinjaman untuk BLUD ini tentu sangat berbeda dengan model kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dalam KPBU, pemerintah harus membayar pinjaman dengan bunga tinggi. Selain itu, pemberi pinjaman juga akan mengelola BLUD dalam waktu tertentu.

"KPBU ini sangat membebani APBD. Karena itu, DPRD tidak pernah setuju," tegas legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Wakil Ketua DPRD M. Kayan SH menambahkan, prosedur peminjaman anggaran untuk BLUD RSUD ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023. Peminjaman dana ke bank oleh BLUD milik Pemkab Sidoarjo mengharuskan ada persetujuan DPRD.

Baca Juga: [Demo Warga Tebel Sidoarjo, Ada Laporan Polisi terhadap Dua Warga](#)

Bank mana yang akan meminjam dana Rp 60 miliar ke RSUD Sidoarjo? Emir maupun Kayan menyatakan ada semacam *beauty contest* antara bank-bank yang berminat. Yang ikut kontes itu, antara lain, bank pemerintah, seperti BRI, BNI, Bank Jatim, dan lain-lain.

Yang akan terpilih adalah bank yang menawarkan bunga paling rendah. Hingga saat ini, yang paling kompetitif adalah Bank Jatim. Bank milik Pemprov Jawa Timur itu menawarkan suku bunga 6,75 persen. Bunga diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar per bulan.

"Ini baru proses awal. Belum final. Jadi, nominal pinjamannya berapa juga masih belum pasti," kata legislator Partai Gerindra tersebut.

Dikonfirmasi soal ini, Direktur Utama RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan membenarkan bahwa pihaknya akan meminjam dana sekitar Rp 60 miliar ke bank. Pinjaman tersebut direncanakan, antara lain, untuk membangun pusat diagnostik, *medical check up*, farmasi, laboratorium, dan lain-lain.


Bangunan tersebut direncanakan setinggi 5 lantai. Posisinya ada di samping Gedung Pusat Terpadu (GPT) RSUD setinggi 7 lantai yang dibangun dengan dana APBD Rp 70 miliar itu. Pusat diagnostik akan melayani masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan meski tidak sedang dalam kondisi sakit.

Dia berharap pada akhir 2023 ini gedung tersebut sudah bisa terwujud. RSUD Sidoarjo diharapkan bisa menjadi satu-satunya RSUD tingkat kabupaten tipe A di Jawa Timur sebelum dirinya pensiun.

"Ya saya utang *dhisik* (meminjam dulu) agar di masa saya, itu pembangunannya selesai," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, RSUD Sidoarjo ditarget mampu mengantongi sertifikasi RS tipe A pada akhir 2023 ini. Di Jatim, baru ada tiga RS tipe A. Yakni, RSUD dr Soetomo Surabaya, RSUD dr Saiful Anwar Malang, dan RSPAL dr Ramelan Surabaya.

Baca Juga: [Jalan Ditembok Pabrik Farmasi, Warga Tebel Geruduk DPRD dan BPN Sidoarjo](#)

Target tersebut diyakini dapat tercapai dengan pembangunan GPT yang dimulai pada 8 Juli 2023 lalu. *Ground breaking* dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Ketua DPRD H Usman MKes, serta jajaran Forkopimda Sidoarjo. (*) 





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO



Mengucapkan



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2023

Terus Melaju Untuk Indonesia Maju



Ketua
H. Jsman. M. Kes

Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE

Wakil Ketua
Kayan, SH

Wakil Ketua
Dr. H. Emir Firdaus, ST, MM

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO

• MENGUCAPKAN •

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

Ke-



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU



Hi Usman M. Kes
Ketua

Bambang Riyoko, SE
Wakil Ketua

Kayan, SH
Wakil Ketua

Dr. Emir Firdaus, ST, MM
Wakil Ketua



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Alih Fungsi Lahan Sempadan dan Saluran Air Oleh PT. Bernofarm Belum Usai, Warga Tebel Datangi Kantor DPRD

RedSidoarjo © Agustus 15, 2023



Liputan5news.com - Sidoarjo. Puluhan warga Desa Tebel Bendo RT 02 RW 01 Kec. Gedangan Sidoarjo mendatangi kantor DPRD Sidoarjo. Hal itu terjadi lantaran warga tidak terima atas peristiwa alih fungsi lahan sempadan dan saluran air oleh PT. Bernofarm. Senin (14/8/2023).

Turut menyambut kedatangan para warga Desa Tebel yakni wakil ketua DPRD M. Kayan dan Emir Firdaus, ketua komisi A Damroni Chudlori, H. Moch Agil Effendi, S.E.

Langgeng Santoso selaku perwakilan warga Desa Tebel menyampaikan keinginan warga kepada para anggota dewan yang menemuinya agar saluran air yang sudah dibeton oleh pihak perusahaan agar dibongkar.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Pihaknya juga meminta agar rencana perluasan lahan PT. Bernofarm dibatalkan.

"Kami meminta lahan tanah sempadan dan saluran air dikembalikan pada fungsinya semula. Warga juga menolak rencana pengurukan dan pembangunan PT. Bernofarm," tegasnya.

Sementara itu, Galih Raditya selaku kuasa hukum PT. Bernofarm menyampaikan sebelum melangkah pihaknya telah memahami legalitas terhadap lahan PT. Bernofarm. Pemahaman tentang history data dari desa dengan legalitas dan kontribusi yang jelas.

Ia mengungkapkan terkait saluran irigasi dan garis sempadan, pihaknya telah mendapat data dari desa, validasi dari desa dan juga telah menelusuri sumber asli desa Tebel.

Terungkap fakta bahwa lahan tersebut adalah lahan persawahan dan kesepakatan untuk iuran lahan dari masing-masing untuk akses jalan menuju sawah. Tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam administrasi desa hanya irigasi yang tercatat. Ketika jatuh ke ahli waris cerita mengenai kesepakatan tersebut putus. Kemudian ahli waris menjual kepada pihak PT. Bernofarm.

"Terkait saluran irigasi sepanjang 60 meter yang melintasi lahan PT. Bernofarm memang tercatat di kantor desa. PT. Bernofarm mengajukan tukar manfaat yang pada awalnya di Pemkab dikembalikan lagi pada kewenangan desa. Dimana ada nilai yang tertuang di situ," jelas Galih.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A DPRD Sidoarjo Berjanji Adakan Sidak Lokasi Keluhan Warga Tebel

PERISTWA Editor: Desy R Selasa, 15 Agustus 2023 : 09:04:32



Pihak Komisi A dan Komisi C di gedung DPRD Sidoarjo, pihak wakil rakyat ini berjanji akan mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi keluhan permasalahan warga Tebel, Sidoarjo. SP/ Hikmah

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Keluhan permasalahan warga Tebel, Kecamatan Gedangan dengan PT Bernofarm Pharmaceutical, terkait bangunan atau pagar yang dibuat PT Bernofarm Pharmaceutical berada di atas jalan desa dan saluran irigasi harus dikembalikan ke fungsinya.

Akhirnya ditampung oleh Komisi A dan Komisi C di gedung DPRD Sidoarjo, pihak wakil rakyat ini berjanji akan mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk melihat fakta dan kejelasan situasi serta akar awal mulai timbulnya persoalan tersebut.

"Sesuai hasil kesepakatan dalam sidang dengar pendapat (hearing) kami akan kembali melakukan sidak," kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.

Menurutnya, warga yang datang menyampaikan aspirasinya itu mengaku tidak pernah dilibatkan dalam mediasi yang masuk dalam berita acara tersebut.

"Tapi sebelum sidak, kami akan berkomunikasi dengan para pihak yang ikut tanda tangan dalam berita acara itu," papar Damroni.

Legislator PKB itu juga ingin memastikan bahwa kasus ini belum masuk ke ranah hukum. Sebab, sebelumnya muncul isu bahwa masalah ini sudah ditangani kejaksaan negeri Sidoarjo.



"Kalau belum masuk ke ranah hukum, yudikatif tentu akan kami tindak lanjuti," ujar Damroni dengan lantang dalam sidang hearing tersebut, Senin (14/08/2023).

Sedangkan Emir Firdaus dari Komisi C DPRD Sidoarjo melanjutkan setelah melakukan sidak lokasi, DPRD segera melakukan pemanggilan lagi kepada pihak-pihak yang berkaitan diantaranya, Pendes Tebel, PT Bernofarm, PU Pengairan, Kecamatan Gedangan dan BPN Sidoarjo, untuk menindak lanjuti persoalan ini untuk penyelesaian.

Keluhan warga Desa Tebel bukan tanpa sebab, mereka menagih janji kepada para wakil rakyatnya, pasalnya pada September 2022 lalu, sudah pernah dilakukan mediasi antara warga dengan DPRD Sidoarjo, dinas terkait, Pendes Tebel, dan perwakilan PT Bernofarm serta warga setempat.

Hasilnya, mereka sepakat melakukan pembongkaran pagar yang berdiri diatas tanah sempadan. Namun, dari pengakuan warga, pembongkaran itu tidak pernah dilaksanakan.

"Dulu, sudah ada surat dari camat untuk meminta pembongkaran. Tapi sampai saat ini tidak kunjung dilakukan. Warga sangat kecewa," ujar Dimas, kuasa hukum warga. **Hdk/hik/dsy**





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, DPRD Sidoarjo Restui RSUD Utang Bank

by Radar Jatim - 16 Agustus 2023 in Kesehatan, Layanan Publik

0



Desain GPT RSUD Sidoarjo. (Foto : Humas RSUD Sidoarjo)



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo membangun dua gedung baru yang akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan canggih.

Direktur Utama RSUD Sidoarjo, dr Atok Irawan mengatakan, dua Gedung Pusat Terpadu (GPT) ini masing-masing setinggi 7 lantai dan 5 lantai.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Kami berharap dengan adanya gedung baru ini dapat meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit tipe A dan memenuhi standar layanan yang lebih tinggi,” katanya, Selasa (15/8/2023).

Pembangunan GPT tersebut diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 130 miliar lebih. Gedung pertama setinggi 7 lantai menghabiskan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

Sedangkan untuk pembangunan gedung kedua setinggi 5 lantai itu pihaknya berencana meminjam ke bank dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.

”Ya *utang disik* (pinjam dulu, red) agar di masa saya, pembangunannya sudah selesai,” ungkapnya.

Untuk pembangunan gedung kedua setinggi 5 lantai itu, pihaknya akan meminjam dana sekitar Rp 60 miliar untuk membangun sarana pusat diagnostik, *medical check up*, farmasi, laboratorium dan lain-lain.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gus Muhdlor Raih Penghargaan Jasa Bakti dari Kemenkop UKM

SIDOARJO - Dinilai berjasa dalam memajukan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dianugerahi penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penghargaan diserahkan di Jogjakarta pada Sabtu (12/8/23) lalu.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berhalangan hadir diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Edi Kurniadi. Jasa Bakti tersebut sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan dharmabaktinya Gus Muhdlor dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Sidoarjo.

Melalui berbagai inisiatif dan kinerja progresif, seperti pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan fasilitasi pasar, telah memberikan kontribusi nyata dalam memajukan kedua sektor tersebut. Gus Muhdlor

mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Kabupaten Sidoarjo.

"Saya ucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan kepada saya dan untuk Sidoarjo. Hal ini tak lepas dari upaya semua pihak khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang ikut mendukung semua program untuk memajukan ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi serta usaha kecil menengah," kata Gus Muhdlor usai membuka pelatihan menjahit di Kecamatan Candi, Selasa, (15/8/23).

Penghargaan Jasa Bakti dalam Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan penghargaan bergengsi dan menjadi bukti bentuk komitmen Gus Muhdlor dalam memajukan sektor ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sido-



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

arjo. Senada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Edi Kurniadi mengatakan penilaian untuk penghargaan ini telah dilakukan

sejak tiga bulan lalu. Dengan kriteria diantaranya profil bupati, program prioritas bupati, rencana ke depan, kiprah bupati, kegiatan dinas koperasi dan usaha mikro.

"Selain beberapa kriteria tersebut, kami juga di wawancara oleh pihak Kementerian. Penghargaan ini diberikan untuk Gubernur yaitu diterima oleh Gubernur Bali. Sedangkan untuk kategori kepala daerah diambil 4 yang mendapatkan penghargaan. Yaitu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sedangkan sisanya penghargaan untuk koperasi," jelasnya.

Edi juga menambahkan, kepedulian Bupati Sidoarjo yang menjadikan koperasi tumbuh pesat serta usaha mikro kecil menengah di Sidoarjo menjadi mandiri sehingga Bupati Sidoarjo berhak mendapatkan penghargaan ini.

"Nantinya kami juga ikut penghargaan satyalencana wira karya. Kedepan, Kabupaten Sidoarjo akan tetap fokus pada perkembangan koperasi dan UMKM," tegas Edi. ● Loe

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Tekan Angka Pengangguran, Disnaker Buka Pelatihan Dasar Menjahit dan Perawatan AC

KOTA-Untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo melakukan pelatihan kerja untuk masyarakat Sidoarjo. Di antaranya pelatihan menjahit, menjahit upper sepatu dan perawatan AC berbasis kompetensi. Pelatihan dilakukan 20 hari berturut-turut. Yaitu pada 15 Agustus hingga 7 September 2023. Diikuti oleh 80 peserta.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang hadir dalam pembukaan acara pelatihan tersebut, meminta agar peserta yang ikut pelatihan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.



● Ke Halaman 10

BERMANFAAT: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat membuka kegiatan pelatihan.



Tekan Angka Pengangguran,...

"Saya minta tolong, manfaatkan kegiatan ini dengan baik karena kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi dan tolong praktikkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini agar acara ini benar-benar memiliki manfaat bagi banyak orang" ujar Gus Mudhlor sapaannya di sela sambutan pembukaan pelatihan menjahit di Kantor Kecamatan Candi, Selasa (15/8).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, kegiatan pelatihan dasar ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo untuk turut menekan angka pengangguran.

"Pelatihan seperti ini merupakan upaya kami untuk menekan peng-

angguran di Sidoarjo. Kita berusaha memberikan skill kepada peserta yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan agar mereka tidak mengandalkan pekerjaan formal namun cukup dengan sektor informal," jelasnya.

Ainun juga menambahkan, peserta dalam pelatihan ini tanpa dipungut biaya dan nantinya akan mendapatkan sertifikat dengan konsekuensi serius mengikuti pelatihan hingga selesai.

"Bagi peserta yang ikut ini, selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan sertifikat BNSP dan juga sertifikat dari Disnaker Sidoarjo," ujarnya.

Dari data Badan Pusat Statistik Sidoarjo, angka pengangguran di Sidoarjo tahun 2021 sebesar 10,87 persen, lalu turun 2,07 persen di tahun 2022 mencapai 8,8 persen. (sai/vga)



✓ **MENGUSUNG TEMA WUJUDKAN SDM PROFESIONAL
BERWAWASAN KEBANGSAAN**

HARI JADI PRAMUKA KE-62 DI ALUN-ALUN

Sidoarjo, Pojok Kiri

Memasuki usianya ke 62 tahun Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Sidoarjo mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya Apel Besar Hari Pramuka ke 62 tahun 2023 di Alun-Alun Sidoarjo, Senin, (14/8). Apel dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo selaku Ketua Kwarcab Sidoarjo, H. Subandi, SH.

Dalam apel besar tersebut diikuti 18 pleton Pramuka yang terdiri dari pramuka penegak dan Pramuka penggalang, 2 pleton istimewa yang terdiri dari 1 pleton pangkalan Pramuka luar biasa dan 1 pleton dari gugus depan pangkalan Lembaga

Pemasyarakatan Sidoarjo serta 1 unit Tim Korsik Pemkab Sidoarjo. Upacara Hari jadi Pramuka ke 62 tahun ini mengusung tema "Dengan Peringatan Hari Pramuka ke-62, Mari kita wujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berwawasan kebangsaan".

Dalam sambutannya Wabup H. Subandi menyampaikan bahwa tema Hari Pramuka tahun ini mengandung arti semangat gerakan pramuka untuk meningkatkan SDM yang lebih profesional. Disamping itu wawasan kebangsaan juga menjadi sangat penting agar nilai-nilai kebangsaan tidak luntur dan

tetap menanamkan nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara.

"Kegiatan pramuka memiliki nilai pendidikan yang sangat penting di era digital saat ini, karena melalui kegiatan pramuka para siswa akan mendapatkan pendidikan karakter dan dapat meningkatkan rasa nasionalisme," ucapnya.

Kedepan Wabup H. Subandi berharap Gerakan pramuka dapat terus maju dan berkembang serta berkiprah untuk membantu masyarakat dan program-program pemerintah serta menangani pendidikan non-formal dalam pembentukan karakter. (Kho/Dy)



Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH saat memimpin apel besar hari jadi Pramuka ke 62 tahun.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Dapat Penghargaan Koperasi

Sidoarjo, Bhirawa

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, mendapat penghargaan dari Kemenkop UKM RI. Penyerahan penghargaan, Sabtu (12/8) akhir pekan lalu, diwakili Kadiskop UM Kabupaten Sidoarjo, M. Edi Kurniadi ST MT.

Di tingkat provinsi, penghargaan ini diterima oleh Gubernur Bali.

Sedangkan untuk kategori kepala daerah, ada 4 daerah yang mendapatkan penghargaan. Yaitu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Penilaian penghargaan ini telah dilakukan sejak tiga bulan lalu. Dengan sejumlah kriteria. Penghargaan ini diberikan, karena dinilai berjasa dalam memajukan koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

“Kedepan, Kabupaten Sidoarjo akan tetap fokus pada perkembangan koperasi dan UMKM,” kata Edi.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1470 koperasi di Kabupaten Sidoarjo pada 2020. Namun, hanya 716 koperasi yang aktif dari jumlah tersebut. [kus]

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
Bhirawa
Wah... Bhirawa... Bhirawa...

Bangun Rumah Sehat yang Terintegrasi dengan RSUD Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo serius meningkatkan layanan kesehatan bagi warganya. Sejumlah program kesehatan sudah berjalan. Selain itu, beberapa program lainnya dicanangkan. Mulai rencana membangun rumah sehat, menaikkan kelas rumah sakit yang dikelola daerah, hingga menggalakkan kembali kader kesehatan.

BUPATI Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan, secara umum Sidoarjo berkeinginan besar menciptakan ekosistem yang menyeluruh di bidang kesehatan. Mulai peningkatan sarana-prasarana hingga kualitas pelayanan. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemkab Sidoarjo.

Pertama, tahun depan Sidoarjo menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki rumah sakit tipe A. "Mengapa kami ngotot untuk bisa tipe A? Karena besok, menurut RUU yang baru, kemungkinan untuk dokter spesialis akan bergeser. Dari *university based* menuju *hospital based*. Pasti RS tipe A yang menunjang itu," jelasnya.

Kedua, pihaknya akan membangun rumah sehat. Rumah sehat ini dibangun untuk memastikan orang yang datang mengenal dirinya dan kelemahan dirinya. Sebab, selama ini, setiap ada *medical checkup* atau pemeriksaan kesehatan lainnya, pasti yang hadir warga berusia 50 tahun ke atas yang sudah rentan terhadap penyakit.

"Perlu didorong yang datang yang usia 30 tahun sehingga sejak dini tahu kelemahannya di mana, kekurangan di mana. Jadi, bisaantisipasi," katanya.

Bagaimana bentuknya? Alumnus SMAN 4 Sidoarjo itu menjelaskan, rencananya dibangun gedung tersendiri di sekitar RSUD Sidoarjo. Bisa mirip hotel dengan *treatment khusus*. Atau tempat istirahat hingga *medical checkup*. Jadi, pengunjung yang datang merasa nyaman.

Valia-ah otai'kalye. Tapi orang, m... tidak seperti orang sakit. Jadi, seperti orang istirahat saja, tapi dicek



LAYANAN KESEHATAN: Antrean pasien di Instalasi Pelayanan Kanker Terpadu (IPKT) RSUD Sidoarjo kemarin. Peningkatan fasilitas dan layanan dilakukan agar RSUD Sidoarjo bisa naik kelas menjadi tipe A.

EMPAT LANGKAH PEMKAB TINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN

1. Menjadikan RSUD Sidoarjo sebagai RS tipe A
2. Membangun rumah sehat
3. Menaikkan kualitas RSUD Sibar dan seluruh puskesmas
4. Menggerakkan 12 ribu kader kesehatan



GRAFIS: RIZKY/ANNA POS

Sementara itu, Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Al Hadad menyampaikan bahwa pihaknya juga ingin mengikuti jejak RSUD Sidoarjo untuk naik tingkat. "Kalau bisa, jika Sidoarjo naik A, kami harus bisa kejar untuk jadi tipe B secepatnya," tegasnya.

Rehabilitasi gedung dan penambahan spesialis menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas RSUD di Kemerakan, Krian, tersebut.

Selain lewat upaya peningkatan sarana-prasarana, DPRD Sidoarjo ingatkan pentingnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman menjelaskan, dinas kesehatan berperan dan bertanggung jawab meningkatkan IPM melalui urusan kesehatan. "Ada tiga konsep dalam urusan kesehatan. Yaitu, promotif, preventif, dan kuratif," paparnya.

"Saat ini IPM Sidoarjo sudah tertinggi ke-4 di Jatim setelah Surabaya, Kota Malang, dan Kota Madiun," terangnya.

Artinya, bukan hanya fasilitas yang ditingkatkan. Upaya penanganan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga harus menjadi perhatian serius. (uzi/era/c14/aru)

KADO UNTUK REPUBLIK

kekuatannya," ujarnya.

Ketiga, menaikkan kualitas rumah sakit. Pihaknya menilai, Sidoarjo ke depan menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki sistem *holding company* terkait dengan rumah sakit.

"Kalau RSUD sudah tipe B dan RSUD Sibar tipe C, harus dinaikkan lagi. Sekaligus kami pastikan sekian tahun ke depan puskesmas yang memenuhi syarat untuk tipe D juga akan kami naikkan," tegasnya.

Ada tiga puskesmas yang sudah masuk kriteria tipe D berdasar pertimbangan wilayah, sarana-prasarana, hingga ketercakupannya wilayah kebutuhan rumah sakit

di sekitarnya. "Kami pastikan *milestone*-nya sudah dibuat. Saya yakin perlahan, tapi pasti," tegasnya.

Keempat, menurut Muhdlor, sangat penting menggerakkan 12 ribu kader kesehatan di Sidoarjo. Tahun ini bantuan insentif bagi mereka sudah diberikan. Mereka juga diproteksi lewat BPJS Ketenagakerjaan. "Yang terpenting, *progress-by-progress* semakin hari semakin bagus dan harus dipastikan besok lebih baik lagi," tuturnya.

Perbaikan pelayanan untuk meningkatkan akreditasi RSUD, baik Sidoarjo maupun Sibar, kini mulai dikejar. Direktur RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan mengungkapkan bahwa gedung pusat terpadu (GPT) akan menjadi pijakan agar RS segera naik kelas menjadi tipe A. "Gedungnya nanti juga berisi beberapa tambahan klinik subspecialis yang memang menjadi syarat dari kenaikan tipe," terangnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



**DOKTER ABDILLAH
SEGAF AL HADAD**
Direktur RSUD Sibar

Kami rutin menggelar forum komunikasi dengan warga maupun pejabat desa sekitar. Untuk evaluasi kami sendiri sekaligus pengenalan agar warga semakin tahu bahwa ada pelayanan kesehatan daerah di Sidoarjo Barat ini."

Lebih Cepat Berobat berkat RSUD Sibar

SEBELUM ada RSUD Sidoarjo Barat (Sibar), kebanyakan warga yang tinggal di wilayah Krian, Balongbendo, Prambon, Tarik, dan Taman hanya bisa mengandalkan rumah sakit swasta berbayar atau pergi ke RSUD Sidoarjo yang jaraknya cukup jauh demi mendapatkan pelayanan kesehatan yang tak bisa ditangani puskesmas. Terutama kondisi darurat.

Misalnya, yang dialami Zainul Fattah. Saat kelingking anak bungsunya patah akibat terjepit balok kayu pada Juni lalu, dia panik. "Bingung itu, awalnya saya bawa ke puskesmas," ungkapnya.

Akan tetapi, anak Zainul yang berumur 5 tahun itu harus segera mendapatkan pertolongan operasi. "Akhirnya saya pergi ke RS Anwar Medika. Ternyata harganya mahal sampai jutaan, sedangkan saya tidak punya uang," ujar warga Sidorejo, Krian, itu.

Zainul lantas kembali ke Puskesmas Krian. "Di sana dikasih pilihan mau ke RSUD Sidoarjo atau Sibar sini," tutur pria 48 tahun tersebut. Karena merasa anaknya butuh segera ditangani, bapak dua anak itu langsung menuju IGD RSUD Sibar. "Alhamdulillah, saat itu juga habis magrib dioperasi, sekarang tinggal lepas penna," jelasnya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu merasa terbantu. "Terlebih bisa gratis karena *ngurus* JKMM (jaminan kesehatan masyarakat miskin) ini, kami diberi waktu yang cukup untuk ke desa dan lainnya," tuturnya.

Lain lagi dengan Kurniawan Ramadhan, 28, warga Kemangsen, Balongbendo. Dia mulanya tidak tahu bahwa RSUD Sibar sudah bisa menerima pasien. "Jadi, anak saya saat itu muntaber parah, langsung saya bawa ke puskesmas," ungkapnya.

Namun, sepulang dari puskesmas, kondisi anak semata wayangnya itu semakin menurun. Setelah dibantu ketua RT dan RW setempat, Kurniawan membawa anaknya menuju RSUD Sibar. "Saya tahunya ya pas dikasih tahu warga itu, katanya bisa pakai JKMM sama seperti di RSUD Sidoarjo pusat sana," jelasnya.

Menurut Kurniawan, RSUD Sibar dirasa perlu untuk turun ke puskesmas atau masyarakat sekitar Sidoarjo Barat untuk sekadar pengenalan. "Sosialisasi sih, untuk kasih tahu, karena banyak orang seperti saya yang tidak tahu bahwa RSUD Sibar bisa melayani JKMM juga," jelasnya. (eza/c7/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIMAS MAULANA/JAWA POS

LATIHAN PENGAMANAN: Sejumlah anggota Brimob bersiap menyerbu dalam latihan sistem pengamanan kota (sispamkota) di parkir timur GOR Delta Sidoarjo kemarin.

Gelar Persiapan Simulasi Pengamanan Pemilu di GOR Delta Sidoarjo

SIDOARJO - Polda Jawa Timur dan Polresta Sidoarjo bersama TNI serta OPD Pemkab Sidoarjo kemarin (15/8) menggelar persiapan simulasi pengamanan Pemilu 2024 di GOR Delta Sidoarjo.

Tampak beberapa mobil *barracuda* serta *water canon* milik Brimob Polda Jawa Timur dipaparkan di sekitar GOR Delta

Sidoarjo. Berbagai peralatan untuk acara tersebut sudah disiapkan aparat gabungan sejak pagi. Sekitar pukul 10.00 tampak juga helikopter dari Polda Jawa Timur turun di lapangan bola PAGERWOJO. Helikopter tersebut merupakan bagian dari persiapan simulasi.

Kasibumas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono meng-

ungkapkan bahwa kemarin merupakan persiapan sebelum dilakukan simulasi secara penuh. Menurut Novi, simulasi tersebut akan berlangsung beberapa hari. Akan tetapi, belum ada jadwal pasti mengenai pelaksanaan simulasi. "Jadwalnya masih diproses sebentar," ujarnya singkat. Diketahui giat tersebut dilakukan sejak pukul 09.00

dan dimulai dengan apel. Simulasi itu lebih menekankan pada pengendalian massa yang tiba-tiba nanti ricuh dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Aksi simulasi tersebut selesai sekitar pukul 15.00. Latihan itu kemudian diakhiri dengan apel penutupan. Agenda simulasi akan dilakukan dua kali lagi. (eza/c6/any)

Jawa Pos

Skandal Kecurangan Pajak Terungkap, Legislatif Tegaskan Perlu Pasang CCTV



SIDAK: Tim dari BPPD Sidoarjo saat melakukan konfirmasi kepada pemilik kafe terkait temuan indikasi kecurangan pajak.

KOTA-Kecurangan dalam pembayaran pajak menjadi sorotan. Hal itu setelah Pemeriksa Pajak Ahli Muda Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Surendro Nurbawono bersama tim melakukan langkah tegas terhadap wajib pajak yang terindikasi melakukan kecurangan.

Dia mengungkapkan, modus kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah wajib pajak beragam. Kecurangan tersebut terjadi dalam bentuk manipulasi pembayaran pajak. Di mana wajib pajak nakal hanya menyetor sekitar 50 hingga 70 persen dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Contohnya, jika jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1 juta, wajib pajak

hanya menyetor sekitar Rp 500 ribu atau Rp 700 ribu. Modus itu diketahui oleh BPPD Sidoarjo melalui analisis tren pembayaran yang dibandingkan dengan kondisi di lapangan.

"Hasil analisis menunjukkan bahwa pada beberapa kasus, data yang terekam oleh tax monitor hanya mencatat dua transaksi dalam sehari," katanya.

Atas temuan tersebut, BPPD Sidoarjo memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut dengan turun langsung ke lapangan. Mereka mengumpulkan nota pembelian, menyamar sebagai pembeli, dan melakukan pengecekan secara langsung di lokasi wajib pajak.

Hasilnya mengejutkan, terdapat perbedaan yang signifikan

● Ke Halaman 10

 RADAR
SIDOARJO.ID

Skandal Kecurangan...

antara data yang terekam oleh tax monitor dengan fakta di lapangan. Bahkan, ada kasus di mana pada jam tertentu, restoran terlihat ramai dengan konsumen, namun data pada tax monitor menunjukkan angka nol.

Rendro menyebut, pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran perda pajak.

"Kami tidak hanya mengandalkan data dari tax monitor, tetapi juga melakukan investigasi langsung di lapangan," imbuhnya.

Data yang diperoleh dari hasil investigasi cukup representatif untuk menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran pajak.

Terkait dengan temuan tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sudjati memberikan harapan agar pemerintah kabupaten (pemkab) Sidoarjo

dapat memaksimalkan pengalangan alat perekam transaksi. Bahl harus kamera CCTV di tempa wajib pajak. "Dipasang secara dan sistematis," katanya.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan Per Asli Daerah (PAD).

Caranya melalui optimalisasi ngutan pajak yang lebih ak transparan. (nis/vga)

 RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Siapkan Rp 90 M untuk Pilkada 2024



M Iskak

KOTA-Selain pemilihan presiden dan legislatif, tahun depan Kota Delta juga akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M Iskak menjelaskan, persiapan anggaran untuk pelaksanaan pilkada mulai dilakukan.

Saat ini pemkab dan dewan sedang membahas KUA-PPAS APBD 2024. Dana untuk pilkada bakal dianggarkan juga.

Iskak menjelaskan, da-

lam pertemuan antara KPU dan pemkab, telah disepakati bahwa anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar Rp 90 miliar. "Untuk mendukung kelancaran dan suksesnya pilkada serentak," katanya.

Menurut Iskak, tahapan pilkada rencananya akan dimulai sejak awal tahun. Namun pihaknya masih harus menunggu aturan lebih lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dia menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp 90 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung operasional badan ad-hoc penyelenggara.

Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (KPPS) selama berlangsungnya berbagai tahapan Pilkada.

● Ke Halaman 10



Siapkan Rp 90 M...

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu juga menjadi perhatian, dan anggaran akan digunakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tersebut.

Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk keperluan logistik.

"Termasuk pengadaan surat suara dan

kelengkapan coblosan yang akan digunakan oleh para pemilih," imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan KPU berkomitmen untuk menjalankan Pilkada 2024 dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran demi terciptanya pemilu yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. (nis/vga)



Seluruh RT di Kecamatan Sedati Dapat Bantuan Sound System

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga desanya. Sebanyak 8820 ketua RT se-Kabupaten Sidoarjo secara bertahap akan mendapatkan bantuan sound system portabel.

Kali ini bertempat di gedung serbaguna Desa Pabean, Kecamatan Sedati, sebanyak 456 ketua RT se-Kecamatan Sedati mendapatkan bantuan sound system, Minggu (13/8).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Subandi, anggota DPRD Fraksi PKB Samsul Hadi, Camat Sedati Abu Dardak, kepala desa se-Kecamatan Sedati, dan seluruh RT se-Kecamatan Sedati.

Kepada perwakilan RT se-Kecamatan Sedati, Subandi mengatakan, bantuan ini merupakan upaya meningkatkan sinergitas antara Pemkab Sidoarjo dengan masyarakat, khususnya di tingkat RT. "RT-RW memiliki pengabdian besar pada warganya. Menjaga kerukunan RT-RW sangat penting



Pemberian bantuan sound system di Kecamatan Sedati.

sebagai penggerak perubahan di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan dampak kemajuan," ujarnya.

Lanjut Subandi, sebagai pimpinan daerah baru pertama kali bertatap muka bersama RT. Pertemuan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Selain bantuan sound system, bupati dan wakil bupati juga memperjuangkan insentif bagi RT RW se-Sidoarjo di tahun 2024, dengan anggaran per tahun Rp 6 juta.

Pada kesempatan ini Subandi

juga mengenalkan para caleg dari Sedati. Di antaranya yang hadir Samsul Hadi.


Sementara, Sriatun mewakili kepala desa se-Kecamatan Sedati menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo atas bantuan sound sistem. "Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan para RT. Mudah-mudahan pula program pemerintah dalam terwujudnya masyarakat Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan, dapat terlaksana," pungkasnya. (adv/din/rd)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

V Jamaah Haji Sidoarjo



Prayitno jamaah haji yang melayangkan gugatan

Gugat Kemenag Ganti Rugi

SIDOARJO - Keluhan dan kekecewaan berujung gugatan ditemui duta.co terkait penanganan jamaah haji asal Sidoarjo. Prayitno, SH., MH(48) mengeluhkan berawal menu makan yang disajikan ketika sedang menjalankan ibadah haji.

Disampingnya jamaah haji asal Kabupaten Sidoarjo Prayitno kecewa akan makanan yang diterima disaat sedang menjalankan ibadah haji. Dan dirinya melayangkan gugatan kepada Kemenag Sidoarjo, Kanwil Kemenag Jatim dan Kemenag RI.

Kepada duta.co Selasa (15/8/23) pria yang biasa disapa bang Prayit yang berprofesi pengacara itu menuntut para tergugat itu membayar Rp 1,150 miliar terkait dugaan penelantaran dan tak dikasih makan 11 kali kepada Jamaah Haji 2023.

"Gugatan sudah kami daftarkan di PN Sidoarjo kemarin usai keluar dari Kantor PN Sidoarjo Jalan R Soeprapto, Senin (14/8/23)," terangnya.

Masih kata Bang Prayit, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu berkaitan Jamaah Haji 2023 yang tidak dikasih makan selama 11 kali.

"Rinciannya tiga hari di Mekah sembilan kali tidak dikasih makan alasannya kateringnya fokus ke Arafah dan Minah," jelas jamaah Haji 2023 asal Kecamatan Candi, Sidoarjo kloter 17 tersebut.

Masih lanjut Prayit, yang dua kali di Muzdalifah tidak dikasih sarapan, bahkan air minum tidak ada sampai makan siang juga tidak dikasih. Baru dikasih jam 5 sore itu untuk makan malam," lanjutnya.

Prayit juga mengaku ada penelantaran jamaah haji ketika di Muzdalifah. Ia mengaku, jamaah yang datang tengah malam dari Arafah ke Muzdalifah janjinya dijemput setelah salat shubuh.

"Namun kenyataannya dijemput jam 9 pagi sampai jam 11 siang, saya yang jam 11 siang itu. Ada jamaah lain yang dijemput jam setengah dua siang, atas kejadian itu saya mengalami dehidrasi," ungkapnya.

Bang Prayit menegaskan, atas kejadian tersebut dirinya meminta kepada para tergugat agar meminta maaf kepada seluruh jamaah haji 2023 melalui media massa. Serta, ia juga meminta ganti rugi 11 kali tak dikasih makan dan penelantaran.

"Total sebesar Rp 150 juta untuk materilnya dan Rp 1 miliar untuk immaterilnya," terangnya.

Sampai dengan berita ini diunggah Kepala Kemenag Sidoarjo belum sempat dikonfirmasi atas surat gugatan yang dilayangkan salah satu jamaah haji asal Sidoarjo tersebut. • Loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Peringati HUT Ke-75 Polwan

Srikandi Polresta Sidoarjo Peduli Masjid dan Sungai

Sidoarjo, Memorandum

Menyambut HUT ke-75 Polwan, Srikandi Polresta Sidoarjo melaksanakan bakti religi di Masjid Baiturrahman Desa Sidokepong, Buduran, Selasa (15/8).

Kepedulian yang dilakukan Polwan Polresta Sidoarjo juga berlanjut dengan kerja bakti membersihkan aliran sungai di Desa Sidokepong. Dengan membersihkan eceng gondok maupun sampah di sungai setempat.

Pada kesempatan ini, Polwan Polresta Sidoarjo juga menyerahkan bantuan alat kebersihan, kitab suci Alquran, dan alat salat kepada takmir masjid Baiturrahman.

Perwira Koordinator (Pakor) Polwan Polresta Sidoarjo Kompol Ria Anggraini menjelaskan bakti religi dan kerja bakti aliran sungai ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-75 Polwan.

Ia berharap melalui sejumlah kegiatan yang dilakukan Polwan Sidoarjo dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. "Selain



Srikandi Polresta Sidoarjo dengan semangat membersihkan eceng gondok dan sampah di aliran sungai Desa Sidokepong dalam rangka HUT Polwan.

berbau dan dekat masyarakat, upaya yang kami lakukan tentu turut mewu-

judkan kondusifitas kamtibmas," pungkasnya. (jok/nov)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Mulai Ramai Pembeli, Pedagang Sisi Barat Pasar Larangan Kembali Tersenyum

“Terimakasih Pak Bupati”

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pedagang Pasar Larangan yang menempati sisi barat kembali tersenyum. Dagangan mereka sudah ramai pembeli. Pendapatan mereka pun berangsur pulih. Tidak seperti tiga bulan sebelumnya yang harus menjual asetnya untuk bertahan hidup.

Lapak-lapak di bagian barat Pasar Larangan mulai terisi. Ada sekitar 135 pedagang yang berjualan di sana. Sebagian dari mereka ada yang masih menggunakan tenda terpal.

Karena lapak yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah penuh. “Terimakasih Pak Bupati. Kita bisa berjualan di sini bersama-sama. Alhamdulillah, di sini sudah cukup ramai,” kata Abdul Aziz, salah satu pedagang di bagian barat Pasar Larangan, Sabtu (12/08/).

Ratusan pedagang pun ramai-ramai mengucapkan terimakasih kepada Dinas



Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta SatPol PP Sidoarjo yang telah memberikan tempat yang layak.

Para pedagang juga akan mendukung Pemkab Sidoarjo untuk menata Pasar Larangan lebih baik, lebih rapi, dan lebih ramai. Kami menyatakan siap membantu Disperindag untuk ikut andil dalam penataan ini. Kita akan gotong royong memajukan pasar ini,” imbuhnya.

Dila, pedagang sayur di Pasar Larangan, mengaku saat ini pendapatannya sudah meningkat sekitar 40 persen dari sebelumnya. Ia

mengaku lapak yang ditempati sekarang juga nyaman. Semuanya rata, pengunjung bisa hilir mudik untuk mencari kebutuhannya.

“Kalau di sini pembeli juga merasa nyaman karena tidak ada parkir. Langsung berhadapan dengan kita,” katanya.

Dila bersama pedagang lainnya juga siap membantu Disperindag Sidoarjo untuk menata Pasar Larangan yang lebih bersih dan tertata rapi. Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Larangan, Soni menjelaskan lapak yang ditempati pedagang

ini merupakan bangunan baru. Bukan dibangun di atas trotoar seperti yang dituduhkan.

Lapak ini ditinggikan dengan paving agar ketika musim hujan para pedagang tidak tergenang air,” ungkapnya.

Soni juga meminta kepada Pemkab Sidoarjo agar para pedagang memiliki legalitas yang benar. Karena sebagian dari pedagang ini masih ragu, takut kembali dipindahkan.

Saya mohon Disperindag untuk memberikan legalitas yang jelas untuk para pedagang ini,” jelasnya. Selain itu, lapak yang masih belum selesai dibangun untuk segera dituntaskan.

Ia juga mengajak para pedagang bagian timur untuk bersama-sama pindah dan menempati lapak yang sudah ada.

Menurut Soni, ada sekitar 40 pedagang yang sampai saat ini enggan pindah ke bagian barat. “Marilah kita bergabung di sini, tetap pemerintah akan memfasilitasi. Di dalam pasar masih banyak lapak yang kosong dan bisa ditempati,” pungkasnya. (Nang)